

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 dibuat oleh pemerintah peralihan sebagai dasar untuk melaksanakan desentralisasi dengan lebih terarah dan diikuti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan awal terbentuknya desentralisasi pemerintahan dan jawaban atas tingginya tuntutan rakyat terhadap desentralisasi pemerintahan.

TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 dibuat oleh pemerintah peralihan sebagai dasar untuk melaksanakan desentralisasi dengan lebih terarah dan diikuti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pasal satu (1) ayat tiga (3) dan enam (6) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi di Kota Tasikmalaya yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengembalikan uang sebesar Rp 2,966 miliar ke kas daerah sesuai temuan BPK RI 2014. Dalam rangka laporan hasil penelitian atas kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 45C/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 5 mei 2015, BPK merinci temuan yang antara lain, adanya kelebihan pembayaran di Dinas Pendidikan sebesar Rp 108,5 juta, Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,029 miliar, Dinas Kesehatan Rp 463,6 juta, Dinas Ciptakarya Rp 130,1 juta, dan Dinas Bina Marga Rp 1,15 miliar (<https://kabarpriangan.co.id/pemkot-tasik-harus-kembalikan-rp-296-miliar/>).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah

bukan hanya sekedar laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang bersifat formalitas, tetapi berisi informasi yang kredibel bagi para penggunanya. Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya diperlukan suatu penatausahaan keuangan yang efektif sehingga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka memenuhi akuntabilitas publik yang semakin dituntut oleh masyarakat seiring berjalannya otonomi daerah.

Selain itu pengendalian intern dalam pelaksanaannya juga harus diuji keefektivitasannya. Penentuan apakah pengendalian telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksanaannya sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (A.Arens, 2008 dalam Prima, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmi Nurmaliani (2014), penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap *good government governance*, artinya bahwa semakin baik penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya akan berdampak pada *good government*.

Adapun penelitian yang penulis lakukan mengacu pada penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Annisa Rahmi Nurmaliani (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good*

Government Governance (Survei Pada Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap *good government governance*.

2. Depi Oktia Ruspina (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Padang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*. Sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan *negative* terhadap penerapan *good governance*.
3. Prima Yuda (2012), dengan judul penelitian “Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Survey Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.
4. Gerry Armando (2013), dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukit Tinggi)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern

pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

5. Ni Made Asih Ristanti dkk (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tambanan ”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Tabel 1.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penelitian Terdahulu	Judul	Persamaan	Perbedaan	Simpulan	Sumber
1	Annisa Rahmi Nurmaliani (2014) Metode survei pada Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pengaruh Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap <i>Good Government Governance</i>	Variabel X yaitu Penatausahaan Keuangan daerah Variabel Y yaitu <i>Good Government Governance</i>	Variabel X yaitu Pengawasan Intern	Pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>good government governance</i>	Skripsi Akuntansi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
2	Depi Oktia Ruspina (2013) Metode studi empiris pada Pemerintahan Kota Padang	Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan	Variabel X yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Y yaitu <i>Good Governance</i>	Variabel X menambahkan kinerja aparatur pemerintah daerah	Kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> . Sedangkan sistem	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang (<i>ejournal.unp.ac.id</i>)

		<i>Good Governance</i>			pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap penerapan <i>good governance</i> .	
3	Prima Yuda (2012) Metode Survey Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya	Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi	Variabel X yaitu Pengendalian Intern	Variabel X yaitu Pelaksanaan <i>Good Governance</i> Variabel Y yaitu Kinerja Organisasi	pelaksanaan <i>good governance</i> dan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.	Skripsi Akuntansi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
4	Gerry Armando (2013) Metode Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bukit Tinggi	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah	Variabel X yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Variabel X yaitu pengawasan keuangan daerah Variabel Y yaitu nilai informasi laporan keuangan pemerintah	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang (<i>ejournal.unp.ac.id</i>)
5	Ni Made Asih Ristanti dkk (2015) Metode kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tambanan	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> .	Variabel X yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Y yaitu Penerapan <i>Good Governance</i>	Variabel X menambahkan komitmen organisasi	Sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> .	Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (<i>ejournal.undiksha.ac.id</i>)

Aldi Nugraha: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan (2016) Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap <i>Good Government Governance</i>						

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan penelitian terdahulu penulis mengajukan pembahasan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah, penatausahaan keuangan daerah dan *good government governance* yang kemudian disusun penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Government Governance*”**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah, penatausahaan keuangan daerah dan *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan penatausahaan keuangan daerah secara parsial terhadap *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan penatausahaan keuangan daerah secara simultan terhadap *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah, penatausahaan keuangan daerah dan *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan penatausahaan keuangan daerah secara parsial terhadap *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan penatausahaan keuangan daerah secara simultan terhadap *good government governance* pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, yakni:

1) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan berfikir serta memperluas pengetahuan baik dalam teori maupun kenyataan yang ada di lapangan.

b) Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa program studi akuntansi yang membutuhkan informasi atau pengetahuan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal pemerintah, penatausahaan keuangan daerah pengaruhnya terhadap *good government governance*.

2) Bagi Kegunaan Operasional

a) Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi yang bersifat positif sebagai bahan masukan dalam menentukan tindakan dan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk peningkatan dan perbaikan pada kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya

b) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat, khususnya bagi masyarakat yang

membutuhkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan mengambil Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai objek penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah 5 (lima) bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2016.

